



## **Koperasi Kredit dan Pemberdayaan Masyarakat**

**Dr. John Dami Mukese, SVD**

### **Paradigma Pembangunan**

Terlepas dari hakikatnya yang normatif, pembangunan sebagai satu proses perubahan merupakan sesuatu yang dinamis dan fleksibel. Sebagai satu proses yang bersinambung menembus waktu dan melintas zaman, pembangunan memiliki kemampuan untuk senantiasa hadir relevan pada setiap zaman. Kemampuan untuk hadir relevan ini memiliki dimensi ganda. Di satu pihak, pembangunan itu memiliki kemampuan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan berbeda dari setiap zaman yang dilewatinya. Sementara itu, atau serentak pada saat yang sama, pembangunan itu juga memiliki kemampuan untuk memberikan solusi-solusi atau jalan keluar terhadap kebutuhan-kebutuhan atau kesulitan khas setiap zaman.

Sehubungan dengan ini maka konsep-konsep serta prinsip-prinsip dasar pembangunan pada umumnya dirancang sebagai konsep-konsep terbuka yang tidak saja siap untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan setiap zaman, tetapi juga yang selalu siap dikritik, digugat, disempurnakan, dan diselaraskan demi memungkinkan dirinya tetap serta terus, dan bahkan semakin mampu memenuhi fungsinya menjawab kebutuhan-kebutuhan berbeda dari setiap zaman yang dilewatinya.

Bagaimana pembangunan itu menyelaraskan kemampuan fungsi kehadirannya sepanjang zaman, merupakan satu proses adaptasi diri selaras dengan perkembangan masalah sosial dan kebutuhan ekonomi serta kepentingan politik manusia yang dilayaninya. Bagaimana manusia membaca dan memandang atau menafsir dan memberi arti pada perkembangan serta arah gejala sosio-ekonomi dan politik tersebut dalam konteks

pembangunan, itulah yang disebut paradigma pembangunan.

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008), ketika berdiskusi tentang paradigma pada umumnya, mengatakan bahwa paradigma adalah “Pandangan dunia yang di dalamnya teori, praktik, pengetahuan, ilmu pengetahuan, tindakan dan seterusnya dikonseptualisasikan”. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa “Paradigma adalah suatu himpunan asumsi, gagasan, pengertian dan nilai (biasanya tidak dinyatakan) yang menetapkan aturan-aturan tentang apa yang relevan dan tidak relevan; pertanyaan apa yang harus dan yang tidak harus ditanyakan; pengetahuan apa yang dilihat sebagai sah; dan praktik apa yang dapat diterima”. Karena itu mereka menyimpulkan bahwa, “Penerimaan atas sebuah paradigma biasanya merupakan konsensus yang tidak dinyatakan, dan sering kali tidak disadari”.

Berpatok pada pengertian tersebut, paradigam pembangunan bisa dimengerti sebagai satu himpunan, dalam arti akumulasi, asumsi, gagasan, pengertian, nilai, dan prinsip-prinsip pembangunan yang menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan serta tindakan-tindakan yang relevan dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dalam konteks sosio-ekonomi dan politik tertentu.

Dengan demikian, dari satu pihak, paradigma pembangunan boleh dimengerti atau dilihat sebagai satu cara bagaimana manusia memberi arti atau makna kepada suatu gejala atau perkembangan pembangunan dengan segala implikasi sosio-ekonomi dan politik yang dihadapkannya. Sedangkan dari pihak lain, paradigma pembangunan juga dilihat sebagai satu model atau cara bagaimana manusia menanggapi gejala-gejala pembangunan dalam bentuk model-model solusi konkret yang ditawarkannya.

Dalam tiga dekade terakhir, paradigma pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat atau *community development*, didominasi oleh tiga konsep pembangunan, yakni: *Holistic*, *Sustainability*, dan *Empowerment*.

*Holistic approach* atau pendekatan pembangunan yang menyeluruh, yang mengemuka selama periode 1980 – 1990-an berasumsi bahwa pendekatan menyeluruh akan mampu mengatasi masalah-masalah pembangunan yang tidak bisa diatasi dengan pendekatan sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong (*piece by piece approach*). Populer pada periode ini jargon-jargon pembangunan seperti, *integral development*, *integrated development*, *integral human development* atau *total human development*. Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan harus dilihat dan diperlakukan sebagai satu totalitas atau satu organisme

yang utuh yang tidak boleh dipilah-pilah berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya yang berbeda, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rohani, jasmani, dan sebagainya. Sebaliknya dia harus dilihat dan diperlakukan sebagai satu manusia dengan kebutuhan-kebutuhan yang terintegrasi dalam dirinya secara utuh. Program untuk mengatasi masalah jasmani, atau kebutuhan material, misalnya, harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa sekaligus juga mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek mental-rohani atau kebutuhan abstrak (Swanepoel & De Beer, 2006).

*Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma dominan periode 1990 – 2000-an. Solusi ini ditawarkan untuk mengatasi masalah pemanasan global (*global warming*) dan perubahan cuaca (*climate change*) sebagai dampak-dampak negatif dari praktik-praktik pembangunan yang salah dan tidak bertanggungjawab. Konsep dasar *sustainable development* ialah membangun sedemikian rupa sehingga hak generasi mendatang atas bumi yang utuh dan layak didiami terjamin. Dengan kata lain, pembangunan saat ini tidak boleh merusakkan alam atau lingkungan agar generasi berikut boleh memiliki bumi yang tetap utuh dan layak dihuni. Jargon-jargon populer berkaitan dengan pendekatan yang dianjurkan antara lain, pembangunan berwawasan lingkungan, membangun selaras alam, pembangunan yang ramah lingkungan, dan pembangunan berbasis lingkungan. Jiwa *sustainable development* secara global dapat dilihat dalam kedelapan sasaran pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dirancang PBB dan diharapkan tercapai pada tahun 2015 mendatang.

Dekade 2000 – 2010-an dialami sebagai satu periode di mana manusia seolah-olah mengalami kelumpuhan global. Fenomena atau gejala-gejala ketidak-berdayaan tampak mencuat di mana-mana dan dalam berbagai bidang. Bukan saja orang miskin yang semakin tidak berdaya dalam menghadapi persoalan-persoalan sosio-ekonomi dan politiknya, tetapi bahkan orang-orang kaya atau negara-negara maju pun sepertinya “*kehilangan daya*” untuk membantu kelompok tidak berdaya yang jumlahnya semakin berlipat ganda. Bencana alam dan bencana buatan manusia yang beruntun terjadi pada periode awal abad 21 ini, memiliki andil cukup besar dalam menyebabkan kelumpuhan ini.

Strategi yang dianggap tepat menjawab persoalan ini ialah pembebasan dan pemberdayaan (*liberation and empowerment*). Asumsi dasarnya ialah bahwa manusia yang terbelenggu berbagai rantai ketidak-berdayaan, seperti kemiskinan, ketidak-tahuan, kerentanan, keterasingan (isolasi), dan kerawanan (Chambers, 1983), harus pertama-tama

dibebaskan dan diberdayakan agar memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun dirinya secara leluasa. Tema-tema pembangunan yang hangat dan relevan saat ini ialah pembebasan, pemberdayaan, kemandirian, pembebasan yang memberdayakan, atau pemberdayaan yang membebaskan.

### **Kerja Pemberdayaan Kontekstual**

Berdirinya Koperasi Kredit payungan Puskopdit Bekatigade Ende-Ngada-Nagekeo yang kini berubah menjadi Puskopdit Flores Mandiri, 40 tahun yang lalu, secara historis, mungkin saja tidak ada kaitannya yang langsung dengan paradigma pembebasan dan pemberdayaan dalam konteks periodisasi pembangunan seperti terurai di atas. Namun, secara konseptual, kaitannya pasti ada. Karena konsep pemberdayaan sendiri sebenarnya sudah ada atau sudah tersirat dalam falsafah pembangunan masyarakat atau *community development* (CD) yang sudah lama dianut oleh para praktisi atau pekerja pembangunan masyarakat. Falsafah itu bunyinya amat sederhana: Pembangunan masyarakat (CD) harus berbasis pada prinsip “Membantu orang miskin agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri”. Setiap upaya membantu orang lemah atau miskin dengan tujuan agar mereka bisa menolong atau membangun diri mereka sendiri pada hakikatnya adalah satu upaya pemberdayaan.

Kalau visi koperasi kredit ialah masyarakat yang mandiri secara finansial atau ekonomi, maka misi utamanya ialah membantu orang miskin agar mereka memiliki kemampuan untuk bisa mandiri atau kuat secara ekonomi, khususnya dalam segi keuangan atau modal usaha. Dan kalau koperasi membantu dalam kerangka visi dan misi seperti itu, di situlah ia melakukan pekerjaan memberdayakan secara konkret dan aktual. Dikatakan konkret dan aktual, karena langsung merupakan solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah sosio-ekonomi yang kontekstual.

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) berbicara tentang pemberdayaan dalam konteks

dialektika kekuasaan dan orang-orang “yang-dirugikan” oleh kekuasaan itu. Menurut mereka, pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari “mereka-yang-dirugikan” (*the disadvantaged*) oleh berbagai jenis dan bentuk kekuasaan. Berkaitan dengan ini mereka berdiskusi tentang empat perspektif berbeda yang melatari kekuasaan, yakni: perspektif pluralis, perspektif elit, perspektif struktural, dan perspektif post-struktural.

Ditinjau dari ***perspektif pluralis***, “Pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu ‘yang-dirugikan’ untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain”. Menurut Ife dan Tesoriero, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara menolong orang atau kelompok “yang-dirugikan” itu untuk belajar dan menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, memanfaatkan jasa media, melakukan aksi politik, serta memahami teknik-teknik menggunakan “sistem” yang ada dalam lingkungan mereka.

Jadi, yang diberdayakan di sini ialah kemampuan bersaing dalam diri setiap individu atau kelompok di antara banyak kalangan yang memiliki kesempatan yang sama untuk tampil sebagai yang terbaik berdasarkan aturan main yang adil serta prinsip-prinsip demokrasi dan saling menghormati hak-hak azasi manusia. Strategi pemberdayaan yang ditawarkan ialah mengajarkan individu atau kelompok “yang-dirugikan” tentang cara-cara bersaing secara fair berdasarkan aturan main atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sementara dari ***perspektif elit***, pemberdayaan adalah satu proses yang bertujuan untuk memperlengkapi pihak “yang-dirugikan” dengan kemampuan berkompetisi untuk bisa bermain dalam pentas kekuasaan kaum elit. Metode yang ditawarkan ialah mendorong pihak-pihak “yang-dirugikan” untuk ikut bermain dalam atau ikut memainkan permainan. Kalau permainan itu adalah kekuasaan, maka mereka diberdayakan untuk bisa ikut memainkan kekuasaan itu. Kalau permainan itu adalah politik, maka mereka diberdayakan untuk bisa ikut memainkan politik itu. Kalau permainan itu adalah ekonomi, maka mereka diberdayakan untuk bisa ikut memainkan ekonomi itu. Ikut “bermain dalam” atau ikut “memainkan” di sini berarti ikut berkompetisi, entah dalam dunia politik, kekuasaan, ataupun ekonomi. Namun, dalam perspektif elit, aturan permainan umumnya sudah ditetapkan atau diatur oleh kaum atau kelompok elit penguasa, dan karenanya cenderung akan dimenangkan oleh kaum elit atau menguntungkan kaum elit itu sendiri. Itulah sebabnya maka pemberdayaan di kalangan kelompok “yang-dirugikan” dalam perspektif elit selalu sulit dilakukan.

Strategi pemberdayaan yang ditawarkan ialah mendorong kelompok “yang-dirugikan”

untuk bergabung dengan kelompok elit guna mempengaruhi mereka dari dalam, atau berkonfrontasi dengan kaum elit dan berupaya mengubah mereka lewat konflik-konflik vertikal, entah dengan cara-cara revolusioner maupun lewat cara-cara damai yang lebih evolutif .

Dari *perspektif struktural*, Ife dan Tesoriero melihat pemberdayaan sebagai bagian dari program perubahan sosial dengan agenda untuk menghilangkan struktur-struktur sosial yang bersifat opresif dalam suatu masyarakat. Namun, justru karena itu, dalam perspektif struktural, pemberdayaan menjadi suatu agenda yang jauh lebih menantang dan berisiko konflik. Mereka “yang-dirugikan” karena terjebak dalam struktur sosial yang menindas akan dapat benar-benar diberdayakan hanya apabila bentuk-bentuk struktur yang merugikan itu dikonfrontasi atau diserang dan dihancurkan. Di sini juga, kerja pemberdayaan akan banyak berhadapan dengan kaum elit yang umumnya menciptakan dan menduduki struktur-struktur yang menindas itu dengan sikap dasar untuk melanggengkan *status quo*.

Strategi yang ditawarkan ialah memperjuangkan pembebasan dari cengkeraman struktur-struktur yang menindas dengan menantang struktur-struktur tersebut guna menghasilkan perubahan struktural yang mendasar. Konflik-konflik vertikal merupakan konsekuensi logis dari setiap aksi konfrontasi, dan sulit dihindarkan.

Dalam *perspektif post-struktural*, kerja pemberdayaan merupakan suatu proses yang lebih menantang lagi. Karena pemberdayaan kelompok “yang-dirugikan” di sini tidak lagi sekedar meruntuhkan struktur-struktur sosial yang menindas. Sebaliknya, proses pemberdayaan harus dimulai dengan kemampuan menemukan bahasa atau kosakata baru yang tepat untuk mendefinisikan kekuasaan serta menemukan pengertian-pengertian baru guna menjelaskan relasi-relasi antara struktur dan kekuasaan serta mekanismenya dalam menciptakan penderitaan bagi kelompok “yang-dirugikan”. Sehubungan dengan itu, strategi pemberdayaan yang ditawarkan ialah perubahan wacana, pemahaman subyektif yang baru, sistem pendidikan yang membebaskan, dan validasi suara-suara lain, dalam arti bahwa bahasa dan kosakata baru untuk mendefinisikan kembali kekuasaan serta jejaring mekanismenya dalam menciptakan penderitaan, sudah menemukan akarnya dalam masyarakat atau sudah melembaga dalam keseharian hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lewat Koperasi Kredit di Flores boleh dikatakan berlangsung dalam perspektif pluralis. Masyarakat miskin yang diberdayakan lewat koperasi, secara sosiologis, adalah warga masyarakat pluralis dan demokratis yang secara

relatif memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Mereka bukanlah terutama merupakan korban struktur yang menindas, dalam arti korban suatu sistem yang kurang adil dalam mendistribusikan peluang bagi setiap individu atau kelompok untuk berkompetisi secara sehat, – kalau toh ada, porsiya relatif kecil –, melainkan terutama merupakan produk cara atau pola berekonomi yang kurang tahu dan tidak cekatan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ditawarkan oleh alam demokrasi untuk berkompetisi, khususnya dalam upaya merekrut kekuasaan atau keberdayaan untuk menjadi pemain yang menentukan dalam perekonomian.

Dalam perspektif pluralis-demokratis, kekuasaan (*power*) menurut Ife dan Tesoriero (2008), “Muncul dari kapasitas seseorang untuk terlibat dalam sistem yang kompetitif, untuk mengetahui ‘aturan main’ dan untuk mampu menggunakan tekanan dan pengaruh”. Jadi, makin banyak dan sering seseorang terlibat atau berpartisipasi dalam serba aktivitas suatu sistem yang kompetitif, makin besarlah kekuasaan yang dia miliki untuk berperan sebagai pihak yang menentukan. Dengan kata lain, dalam konteks perekonomian, seseorang akan semakin berdaya atau keberdayaannya akan cenderung meningkat kalau ia menjadikan aksi berpartisipasi seperti itu sebagai bagian dari bisnis atau rutinitas perekonomiannya.

Konkretnya dalam hidup berkoperasi, frekuensi keterlibatan atau partisipasi itu terjadi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah atau anggota koperasi dengan koperasinya atau dengan pihak lain dengan siapa ia membangun jejaring kompetisi untuk merekrut kekuasaan. Dalam masyarakat pluralis-demokratis, pemberdayaan model ini merupakan satu proses yang relatif mudah terjadi. Tinggal saja bagaimana para pekerja pembangunan, baik yang ada di lapangan, yang secara langsung berbaur dengan pihak-pihak “yang-dirugikan”, maupun yang berkecimpung dalam lembaga-lembaga perencanaan yang merancang strategi dan kebijakan pembangunan yang relevan dan lebih memihak pada mereka “yang-dirugikan”, serta para pengembang dan penebar konsep-konsep dan wacana pembangunan di lembaga-lembaga pendidikan dan media massa, bekerja sama secara lebih terpadu untuk memberi pencerahan yang lebih cerah kepada kelompok “yang-dirugikan”, serta secara lebih sadar menghindarkan diri dari perilaku-perilaku “serigala berbulu domba” yang lebih banyak menyesatkan masyarakat dan pada akhirnya menjebak mereka dalam jaringan kekuasaan kepentingan para pekerja pembangunan itu sendiri yang sering amat rapih terbungkus di balik motivasi-motivasi “berbulu domba” itu.

## **Penutupan**

Mengakhiri tulisan ini, tertitip pertanyaan penting sejalan dan searah dengan paradigma pembangunan mutakhir seperti diuraikan terdahulu, yakni bagaimana masyarakat, khususnya kelompok “yang-dirugikan”, yang masih merupakan mayoritas di tengah-tengah kemiskinan seperti di NTT atau di Flores khususnya, bisa dientas atau dibebaskan dari lumpur kemiskinan agar mereka lebih berdaya membangun kehidupan mereka di masa depan? Untuk itu, satu kerangka pembangunan yang relevan mesti dirancang dengan baik. Katakan saja misalnya, satu model atau pendekatan pembangunan yang bermatra ganda. Dari satu sisi ia menawarkan kebijakan pemberdayaan yang membebaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan, dan serempak dari sisi lain ia juga menawarkan kiat-kiat pembebasan yang memberdayakan orang miskin agar mereka dapat secara lebih leluasa membangun di atas kemampuan yang mereka miliki. Singkat kata, kita membutuhkan satu program pembebasan yang memberdayakan dan atau program pemberdayaan yang membebaskan.

Model itu dimiliki oleh Koperasi pada umumnya, dan Koperasi Kredit pada khususnya. Tetapi mengapa masih banyak orang miskin di Flores dan NTT? Di samping begitu banyak koperasi, Koperasi Kredit payungan Puskopdit Bekatigade Ende-Ngada-Nagekeo dan sejak Rapat Anggota Khusus tanggal 6 Februari 2011 telah berubah menjadi Puskopdit Flores Mandiri sudah berkiprah selama 40 tahun di sini menawarkan jalan mulus tersebut menuju kesejahteraan. Sayang benar karena belum banyak yang mau memanfaatkannya. Tantangan visi dan misi Puskopdit Flores Mandiri 40 tahun ke depan!

=====

#### **Referensi:**

**Swanepoel, Hennie & Frik De Beer.** 2006. Community Development. Breaking the Cycle of

Poverty. Fourth edition. Juta and Co Ltd. P.O. Box 24309, Lansdowne, South Afrika 7779

**Ife, Jim & Frank Tesoriero.** Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat

di Era Globalisasi. Edisi ke-3. Terjemahan Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, dan M. Nursyahid. Pustaka Pelajar, Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

**Chambers, Robert.** 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3S, Jakarta